

## PERAN PENERIMAAN PAJAK DALAM USAHA PEMERATAAN PENDAPATAN

Dwi Nusiantari  
Direktorat Jenderal Pajak

Adhipradana P. Swasito  
Politeknik Keuangan Negara STAN

adhipradana.ps@pknstan.ac.id

---

### INFORMASI ARTIKEL

Dinyatakan Diterima  
[19 01 2020]

#### KATA KUNCI:

pajak, pemerataan pendapatan, *gini*  
*coefficient*, panel data

#### KLASIFIKASI JEL:

H20

### ABSTRAK

*Income inequality is a classic problem that is always a concern either by policymakers or academics. Currently, policymakers use tax as a tool to encourage income redistribution and reduce income inequality. This study presents empirical evidence regarding the effect of tax revenue on income distribution in several countries. This study utilizes data (panels) from several countries since 1999 and found that tax revenue did not have a significant impact on income distribution efforts.*

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Saat ini para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh dari penerimaan pajak terhadap pemerataan pendapatan di beberapa negara. Menggunakan data (panel) dari beberapa negara sejak tahun 1999, penelitian ini menemukan bahwa, penerimaan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha pemerataan pendapatan.

## 1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah klasik yang selalu menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan atau para akademisi. Para akademisi masih terus berusaha mencari apakah ketimpangan pendapatan memberikan efek positif atau negatif. Berg dan Ostry (2017) mengungkapkan bahwa para ekonom klasik, contohnya Adam Smith, menganggap bahwa ketimpangan pendapatan merupakan hal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan mendorong kelompok berpenghasilan tinggi untuk berinvestasi. Hal ini akan menstimulasi akumulasi kapital dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini pun disepakati oleh ekonom prominen di masa sekarang seperti Robert Barro. Namun Barro (2000) secara spesifik menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di negara-negara maju, sedangkan hasil sebaliknya terjadi di negara-negara miskin.

Di sisi lain, penelitian-penelitian lain menyanggah pendapat-pendapat klasik tersebut. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan justru menghambat pengembangan sumber daya manusia, menimbulkan kecemburuan sosial, menyebabkan krisis finansial, meningkatkan permasalahan kesehatan, dan menurunkan ekspektasi masa hidup, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian (Galor dan Zeira, 1993; Bastagli, Coady, dan Gupta, 2012; Berg dan Ostry, 2017; De Vogli, 2005). Bahkan muncul pandangan bahwa ketimpangan pendapatan menyebabkan keresahan social di Timur Tengah dan diindikasikan mengarah ke terorisme (International Monetary Fund, 2014; Ezcurra dan Palaicios, 2016).

Untuk mencegah efek negatif bagi social ekonomi, pengambil kebijakan di berbagai negara terus berusaha untuk mengurangi angka ketimpangan pendapatan. Pasca perang dunia kedua, para pengambil kebijakan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menekan ketimpangan pendapatan. Tercatat bahwa pada periode pasca perang dunia kedua, banyak negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang tinggi terhadap wajib pajak individu maupun wajib pajak perusahaan (Bird 2003). Namun, kebijakan ini banyak digugat dan kemudian dipertanyakan terutama di tahun 1970-an karena dianggap tidak efektif. Bahkan kebijakan tarif pajak yang tinggi tersebut berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan karena menghambat konsumsi dan investasi (Bird 2003, Feldstein 2012).

Saat ini konsolidasi kebijakan fiskal lebih banyak digunakan dibanding penerapan tarif pajak yang tinggi. Di negara-negara maju, konsolidasi kebijakan

fiskal terbukti memiliki peran sentral dalam memperbaiki masalah ketimpangan sosial (Bastagli, Coady, dan Gupta, 2012). Mereka menjelaskan bahwa pemerintah negara maju melakukan intervensi dalam pemerataan distribusi pendapatan melalui perpaduan antara penerapan perpajakan yang progresif serta melalui distribusi pengeluaran pemerintah yang produktif dan efisien. Langkah konkret dari perpaduan kebijakan fiskal tersebut berupa peningkatan pengawasan perpajakan untuk mengurangi penghindaran pajak, peningkatan progresifitas pajak untuk kelompok berpenghasilan tertinggi, serta pengurangan belanja pemerintah yang tidak produktif (Bastagli, Coady, and Gupta, 2012; Taghizadeh-Hesary, Yoshino, and Shimizu, 2019).

Jika dibandingkan, dampak dari pengenaan pajak lebih cepat terealisasi dalam menekan angka ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan distribusi pengeluaran pemerintah yang menysasar kelompok berpenghasilan terendah, pengenaan pajak dapat mempengaruhi baik kelompok berpenghasilan tertinggi dan kelompok berpenghasilan terendah. Kelompok berpenghasilan tertinggi akan dikenakan beban pajak yang tinggi dengan menggunakan skema tarif pajak progressif. Sementara itu, kelompok berpenghasilan terendah tidak perlu membayar pajak dengan adanya ketetapan batas bawah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (di Indonesia dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak). Sejalan dengan hal tersebut International Monetary Fund (2014) menyarankan bahwa kebijakan mobilisasi pendapatan melalui perpajakan seharusnya juga lebih fokus dalam meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak penghasilan serta mengurangi fasilitas perpajakan untuk pajak penghasilan.

Umumnya, penelitian-penelitian yang tersedia lebih memfokuskan pada pengaruh pajak progressif terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Kemungkinan besar ini dikarenakan konsensus di kalangan peneliti atau pengambil kebijakan yang mengetahui dampak nyata dari pengenaan pajak progresif terhadap pemerataan pendapatan. Namun demikian, tidak semua negara memiliki penerimaan pajak yang didominasi oleh pajak yang bersifat progresif. Di negara-negara berkembang penerimaan pajak justru di dominasi oleh pajak tidak langsung yang umumnya bersifat regresif (Bird dan Zolt, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk melihat dampak dari total penerimaan pajak terhadap ketimpangan pendapatan.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Sebagai salah satu fungsi kebijakan fiskal, pajak merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk distribusi pendapatan. Artinya, sebagian dari pendapatan masyarakat akan dimobilisasi oleh negara

untuk digunakan dalam membiayai pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya dirasakan oleh para pembayar pajak saja. Konsolidasi antara kebijakan perpajakan dan kebijakan belanja negara memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Berbagai penelitian berbasis regresi telah menemukan bahwa perpaduan antara peningkatan pengenaan pajak dan peningkatan belanja negara di sektor sosial berperan dalam usaha pemerataan pendapatan (Martinez-Vazquez, Vulovic, dan Moreno-Dodson, 2012). Penelitian-penelitian mereka juga menemukan bahwa pajak tidak langsung yang bersifat regresif juga berkontribusi dalam pemerataan pendapatan, namun kontribusinya tidak sebesar pajak penghasilan.

Pajak penghasilan umumnya memiliki karakteristik progresif yang sesuai untuk menekan ketimpangan pendapatan. Dan banyak penelitian, disimpulkan bahwa pajak progresif berperan dalam menekan angka ketimpangan pendapatan (Lambert, 1993; Biswas, Chakraborty, & Hai 2017; Matorano 2019). Meskipun demikian, Bastagli, Coady, and Gupta (2012) membuktikan bahwa peran pajak progresif dalam menekan angka ketimpangan pendapatan semakin lama semakin menurun.

Perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua pajak bersifat regresif. Pajak untuk konsumsi barang dan/atau jasa merupakan jenis pajak yang bersifat regresif. Jenis pajak ini tidak membebankan pajak yang lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan tertinggi. Bahkan, beban pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah.

Contoh pajak yang bersifat regresif yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Karena sifatnya yang regresif, pajak ini dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Beberapa peneliti juga telah menyimpulkan bahwa pajak tidak langsung berkontribusi pada peningkatan angka ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang (Tanzi dan Zee, 2000; Tamaousine, 2014). Namun demikian, kontribusi jenis pajak ini terhadap penerimaan pajak cukup besar. Bahkan di negara-negara berkembang, penerimaan pajak banyak bergantung pada penerimaan dari pajak regresif. Oleh karena itu, Bird dan Zolt (2005) justru menyatakan bahwa fokus kebijakan negara berkembang seharusnya lebih menitikberatkan pada perluasan basis pajak atas konsumsi barang dan jasa.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini membandingkan tiga model untuk mengidentifikasi hubungan antara ketimpangan pendapatan dan penerimaan pajak. Variabel rasio

pajak akan digunakan sebagai *proxy* atas variabel penerimaan pajak.

Model pertama menggambarkan hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan rasio pajak total. Kemudian, model kedua dan ketiga menunjukkan hubungan ketimpangan pendapatan dengan rasio pajak langsung dan rasio pajak tidak langsung. Uji statistik Hausmann digunakan untuk menguji ketiga model tersebut, dan hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa efek tetap pada data panel dapat digunakan. Penelitian ini membandingkan hasil statistik dari ketiga model ekonometrik untuk membuktikan model yang paling sesuai dalam menggambarkan hubungan rasio pajak dan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diobservasi.

Name	Level of income
Poland	High income
Russian Federation	High income
Uruguay	High income
Belarus	Upper middle income
Brazil	Upper middle income
Peru	Upper middle income
Armenia	Lower middle income
Georgia	Lower middle income
Kyrgyz Republic	Lower middle income
Moldova	Lower middle income
El Salvador	Lower middle income
Ukraine	Lower middle income

#### 3.1 Penerimaan Pajak Total

Model pertama secara ekonometrika dapat ditunjukkan dalam persamaan berikut:

$$gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 gini_{ag1_{it}} + \beta_2 tr_{it} + \beta_3 tr_{it}^2 + \beta_4 gdp_{it} + \beta_5 gdp_{it}^2 + \beta_6 lfr_{m_{it}} + \beta_7 lfr_{re_{it}} + \beta_8 unemp_{it} + \beta_9 iv_{it} + \beta_{10} av_{it} + \beta_{11} inf_{it} + \beta_{12} fdi_{it} + \beta_{13} pop_{b15_{it}} + \beta_{14} pop_{a65_{it}} + \delta_t T_t + \epsilon_{it}$$

Variabel yang menjadi perhatian utama adalah rasio pajak, sehingga parameter yang menjadi focus adalah parameter  $\beta_2$  dan  $\beta_3$ . Dua parameter tersebut menjelaskan hubungan rasio pajak total dan rasio pajak total kuadrat dengan koefisien gini yang mewakili ketimpangan pendapatan.

#### 3.2 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Model kedua dan ketiga merupakan pengembangan dari model pertama. Model kedua dan ketiga mengklasifikasikan penerimaan pajak menjadi penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pengaruh penerimaan pajak langsung (yang umumnya bersifat progresif) dan penerimaan pajak tidak langsung (umumnya bersifat regresif) terhadap ketimpangan pendapatan (koefisien gini). Model kedua dan ketiga disajikan dalam persamaan berikut:

$$gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 gini_{ag1_{it}} + \beta_2 dtr_{it} + \beta_3 dtr_{it}^2 + \beta_4 gdp_{it} + \beta_5 gdp_{it}^2 + \beta_6 lfr_{m_{it}} + \beta_7 lfr_{re_{it}} + \beta_8 unemp_{it} + \beta_9 iv_{it} + \beta_{10} av_{it} + \beta_{11} inf_{it} + \beta_{12} fdi_{it} + \beta_{13} pop_{b15_{it}} + \beta_{14} pop_{a65_{it}} + \delta_t T_t + \epsilon_{it}$$

$$gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 gini_{lag1it} + \beta_2 itr_{it} + \beta_3 itr_{it}^2 + \beta_4 gdpc_{it} + \beta_5 gdpc_{it}^2 + \beta_6 lfpr_{m_{it}} + \beta_7 lfpr_{f_{it}} + \beta_8 unemp_{it} + \beta_9 iv_{it} + \beta_{10} av_{it} + \beta_{11} inf_{it} + \beta_{12} fdi_{it} + \beta_{13} pop_{b15_{it}} + \beta_{14} pop_{a65_{it}} + \delta_t T_t + \epsilon_{it}$$

Variabel-variabel kontrol yang digunakan merupakan variabel-variabel yang telah umum digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis. Secara spesifik, persamaan yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan berdasarkan model yang digunakan oleh Bastagli, Coady dan Gupta (2012) serta International Monetary Fund (2014).

Variables	Description
Gini	Gini coefficient
$gini_{lag1}$	Gini with lag 1
Tr	Tax ratio
$tr^2$	Tax ratio squared
Dtr	Direct tax ratio
$dtr^2$	Direct tax ratio squared
Itr	Indirect tax ratio
$itr^2$	Indirect tax ratio squared
Gdpc	GDP per capita
$gdpc^2$	GDP per capita squared
$lfpr_m$	Labor force participation rate - male
$lfpr_f$	Labor force participation rate - female
unemp	Unemployment
Iv	Industrial value added
Av	Agricultural value added
Inf	Inflation
Fdi	Foreign direct investment
$pop_{b15}$	Population age below 15
$pop_{a65}$	Population age 65 and after 65

#### 4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil uji statistik-t dan nilai-p, model ketiga menunjukkan hasil yang paling sesuai dan dapat dimplikasikan bahwa model ketiga merupakan model yang paling tepat untuk menyajikan hubungan pajak dan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diamati. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dilihat bahwa pajak tidak langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan di negara-negara yang di observasi. Sebaliknya, model pertama dan model kedua menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak secara total dan penerimaan pajak langsung tidak berdampak besar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diamati.

##### 4.1 Variabel Utama

Tabel berikut merangkum hasil estimasi variabel utama dalam ketiga model. Seperti dapat dilihat pada Tabel, dalam model pertama (model rasio pajak total), nilai p dari rasio pajak total dan rasio pajak total kuadrat tidak signifikan untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan, Sehingga model pertama kurang sesuai untuk digunakan.

Model kedua juga menunjukkan hasil yang serupa. Koefisien rasio pajak langsung dan rasio pajak langsung kuadrat memiliki nilai p yang cukup tinggi, sehingga variabel-variabel tersebut juga tidak signifikan dalam menjelaskan ketimpangan

pendapatan. Namun, hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien rasio pajak langsung memiliki tanda negatif. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada dasarnya rasio pajak langsung berpotensi menurunkan koefisien gini, namun tidak signifikan secara statistik.

Variables	Coefficients	T-stat	P-value	R-squared	F-Stat
Total tax ratio	-12.1705 (55.35503)	-0.22	0.827	Model 1 = 0.8883	2.76
Total tax ratio squared	85.87138 (155.4153)	0.55	0.583	Model 1 = 0.8883	2.76
Direct tax ratio	29.04469 (65.98917)	0.44	0.661	Model 2 = 0.8898	2.58
Direct tax ratio squared	-238.4219 (645.5464)	-0.37	0.713	Model 2 = 0.8898	2.58
Indirect tax ratio	-109.4456 (55.38268)	-1.98	0.053	Model 3 = 0.8796	2.91
Indirect tax ratio squared	557.1574 (271.4362)	2.05	0.044	Model 3 = 0.8796	2.91

Sementara itu, model ketiga (model rasio pajak tidak langsung) menggambarkan hasil yang lebih baik untuk t-statistik dan nilai p. Hasil regresi menunjukkan bahwa model ketiga merupakan model yang paling sesuai dalam menunjukkan hubungan rasio pajak dengan ketimpangan pendapatan. Menggunakan kalkulasi sebagaimana ditunjukkan, nilai koefisien rasio pajak tidak langsung dapat ditentukan sebesar 1.004,87. Dapat dinyatakan bahwa rasio pajak tidak langsung berpengaruh positif terhadap koefisien gini. Semakin besar penerimaan pajak tidak langsung, semakin tinggi koefisien gini, dan itu akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

$$gini = \beta_2 itr + \beta_3 itr^2$$

$$\frac{\partial gini}{\partial itr} = \beta_2 + 2\beta_3 itr = -109.4456 + 2(557.1574) = 1004,8692$$

##### 4.2 Variabel Kontrol

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa dari ketiga model yang diuji, variabel kontrol yang berpengaruh secara signifikan hanya koefisien dari variabel Gini lag 1 dan koefisien dari variabel penanaman modal asing. Berikut ditampilkan hasil dari variabel kontrol untuk masing-masing model.

###### Model Pertama

Variables	Coefficients	T-statistic	P-value
Gini lag 1	0.2827584 (0.1195815)	2.36	0.021
GDP per capita	-0.003862 (0.0006784)	-0.57	0.571
GDP per capita squared	3.83e-08 (3.62e-08)	1.06	0.293
Labor force participation rate - male	0.0946806 (0.2274076)	0.42	0.679
Labor force participation rate -female	0.0076557 (0.1791175)	0.04	0.966
Unemployment	0.1046167 (0.1583394)	0.66	0.511
Industrial value added	-0.212983 (0.114805)	-0.19	0.853
Agricultural value added	-0.1033914 (0.1133875)	-0.91	0.365
Inflation	0.0093323 (0.0343808)	0.27	0.787
Foreign direct investment	7.32e-11 (3.19e-11)	2.30	0.025
Population - age below 15	0.0092868 (0.6970697)	0.01	0.989
Population - age 65 and after 65	-0.5729 (1.185064)	-0.48	0.630

Note: Coefficients are followed by standard error

### Model 2

Variables	Coefficients	T-statistic	P-value
Gini lag 1	0.3057335 (0.1205971)	2.54	0.014
GDP per capita	-0.003768 (0.0006896)	-0.55	0.587
GDP per capita squared	3.82e-08 (3.80e-08)	1.01	0.319
Labor force participation rate – male	0.085352 (0.2296001)	0.37	0.711
Labor force participation rate -female	0.0165991 (0.1858066)	0.09	0.929
Unemployment	0.1460547 (0.1626903)	0.90	0.373
Industrial value added	-0.494928 (0.1183766)	-0.42	0.677
Agricultural value added	-0.1443118 (0.1044431)	-1.38	0.172
Inflation	-0.0055366 (0.0334893)	-0.17	0.869
Foreign direct investment	6.45e-11 (3.26e-11)	1.98	0.052
Population - age below 15	0.0096963 (0.7084007)	0.01	0.989
Population - age 65 and after 65	-0.4450503 (1.179999)	-0.38	0.707

Note: Coefficients are followed by standard error

### Model 3

Variables	Coefficients	T-statistic	P-value
Gini lag 1	0.2646959 (0.1188558)	2.23	0.030
GDP per capita	-0.0001814 (0.0006739)	-0.27	0.789
GDP per capita squared	3.07e-08 (3.54e-08)	0.87	0.390
Labor force participation rate – male	0.2696805 (0.2404098)	1.12	0.266
Labor force participation rate –female	-0.0622143 (0.1818592)	-0.34	0.733
Unemployment	0.2020378 (0.1387884)	1.46	0.151
Industrial value added	-0.0044 (0.1316676)	-0.03	0.973
Agricultural value added	-0.1246918 (0.1151651)	-1.08	0.283
Inflation	0.0059945 (0.032658)	0.18	0.855
Foreign direct investment	5.28e-11 (3.29e-11)	1.61	0.114
Population - age below 15	0.1179549 (0.7070276)	0.17	0.868
Population - age 65 and after 65	-0.2048378 (1.188573)	-0.17	0.864

Note: Coefficients are followed by standard error

## 5. DISKUSI

Jika karakteristik negara yang diamati diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendapatannya, sembilan dari dua belas negara yang diamati adalah negara berpendapatan menengah, yaitu negara-negara berkembang. Efektivitas pajak langsung dengan karakteristik progresif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di negara-negara berkembang masih menjadi masalah yang dapat diperdebatkan, karena pajak langsung diklaim memiliki beberapa keterbatasan. Hasil penelitian ini, khususnya hasil estimasi dalam model kedua di mana

rasio pajak langsung tidak signifikan dalam mempengaruhi koefisien gini, mendukung argumen oleh Sharpe (2003), Bird dan Zolt (2005), Engel et al. (1999), dan Gandhi (1992), yang percaya bahwa pajak langsung kurang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Carter dan Matthews (2012) serta Freitas (2012), pajak langsung tidak efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan karena implementasi di suatu negara tergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat biaya administrasi, potensi sektor informal, dan tingkat penghindaran pajak. Carter dan Matthews (2012) secara khusus mengusulkan reformasi pajak untuk membuat pajak langsung lebih efektif, misalnya dengan menerapkan peningkatan dalam sistem administrasi pajak atau sistem teknologi informasi.

Hasil utama dari penelitian ini adalah hasil dari model ketiga yang menyajikan bahwa secara statistik, pajak tidak langsung mempengaruhi koefisien gini dengan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, pada negara-negara yang diamati, semakin besar penerimaan pajak tidak langsung akan secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Bird dan Zolt (2005), yang menemukan bahwa pajak tidak langsung lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Namun demikian, hasil model ketiga selaras dengan argumen Tanzi dan Zee (2000) yang percaya bahwa negara-negara berkembang cenderung bergantung pada pajak tidak langsung dan itu membuat ketimpangan pendapatan lebih besar. Dalam konteks ini, pajak tidak langsung di negara-negara yang diamati sangat regresif dan memiliki peran besar dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Hasil lain yang dapat disimpulkan dari estimasi ketiga model dalam penelitian ini ialah bahwa di negara-negara yang diamati, struktur pajak saat ini tidak berkontribusi besar untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga, penelitian ini mengusulkan agar negara-negara berkembang lebih mempertimbangkan kebijakan lain untuk mengurangi masalah pemerataan pendapatan, contohnya menggunakan kebijakan pengeluaran sosial (Engel et al., 1999).

Pertimbangan lain yang mungkin diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah implementasi reformasi pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak langsung. Reformasi pajak dapat diimplementasikan dengan mengubah undang-undang perpajakan, menaikkan tarif pajak, atau memperluas basis pajak.

Namun, pelaksanaan reformasi pajak harus mempertimbangkan beberapa aspek. Allan (1971, hal. 36-44), berpendapat bahwa ada enam kriteria dalam

memilih basis pajak yang sesuai: ekuitas, netralitas, kepastian, bukti, efisiensi administrasi, dan analisis ekuilibrium parsial. Mengenai kriteria ekuitas, ia berpendapat bahwa basis pajak harus mencapai tingkat yang paling tepat, karena jika basis pajak terlalu tinggi, itu akan meningkatkan kasus penghindaran pajak (ibid, hal. 36-44).

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini meneliti bagaimana penerimaan pajak dapat berperan dalam usaha pemerataan pendapatan. Untuk mendapatkan jawaban atas masalah tersebut, penelitian ini membagi penerimaan pajak menjadi pajak langsung (dengan karakteristik progresif) dan pajak tidak langsung (dengan karakteristik regresif). Kemudian, menggunakan model ekonometrika, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pajak dan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diamati tidak sepenuhnya signifikan. Salah satu model menyajikan bahwa pajak tidak langsung secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diamati, dan sebagai hasilnya, dapat ditafsirkan bahwa pajak tidak langsung sangat regresif di negara-negara ini.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa di negara-negara yang diamati didominasi oleh negara-negara berkembang. Penerimaan pajak langsung (dengan karakteristik progresifnya) memiliki dampak yang sangat kecil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil ini mendukung argumen yang menekankan bahwa pajak langsung kurang efektif untuk mengurangi kesetaraan pendapatan di negara-negara berkembang, karena beberapa faktor, seperti kualitas sistem perpajakan yang rendah, ukuran sektor informal yang besar, dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara yang diamati, selain mempertimbangkan kebijakan pengeluaran sosial, penting untuk meningkatkan jumlah pajak langsung yang dikumpulkan dengan menerapkan reformasi pajak. Reformasi pajak dapat ditentukan dengan beberapa tindakan, seperti mengubah undang-undang perpajakan, meningkatkan tarif pajak, dan memperluas basis pajak.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Allan, CM 1971, *The theory of taxation*, Manchester.  
Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of economic growth*, 5(1), 5-32.  
Bastagli, F., Coady, D., & Gupta, S. (2012). *Income Inequality and Fiscal Policy* (2nd Edition). Staff Discussion Notes, 12(08), 1.

- Berg, A. G., & Ostry, J. D. (2017). Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? *IMF Economic Review*, 65(4), 792–815.
- Bird, R.M. (2003). 'Taxation in Latin America: Reflections on Sustainability and the Balance between Equity and Efficiency'. *International Tax Program Papers 0306*. Toronto, Ontario: Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto.
- Bird, RM, & Zolt, EM. (2005). The limited role of the personal income tax in developing countries. *Journal of Asian Economics*. vol. 16. pp. 928-946
- Biswas, S., Chakraborty, I., & Hai, R. (2017). Income Inequality, Tax Policy, and Economic Growth. *Economic Journal*, 127(601), 688–727.
- Carter, A & Matthews, S 2012, 'How tax can reduce inequality', *Business and Economics OECD*, vol. 290/291, pp. 53-54.
- De Vogli, R. (2005). Has the relation between income inequality and life expectancy disappeared? Evidence from Italy and top industrialised countries". *Journal of Epidemiology & Community Health*. 59 (2): 158–62.
- Engel, EMRA, Galetovic, A & Raddatz, CE 1999, 'Taxes and income distribution in Chile: some unpleasant redistributive arithmetic', *Journal of Development Economics*, vol. 59, pp. 155-192.
- Ezcurra, R., & Palacios, D. (2016). Terrorism and spatial disparities: Does interregional inequality matter?. *European Journal of Political Economy*, 42, 60-74.
- Feldstein, M. (2012). The Mirrlees Review. *Journal of Economic Literature*, 50(3): 781–90.
- Freitas, JD 2012, 'Inequality, the politics of redistribution and the tax mix', *Public Choice*, vol. 151, pp. 611-630.
- Galor, O. & Zeira, Joseph. (1993). Income Distribution and Macroeconomics. *The Review of Economic Studies*. 60: 35–52
- Gandhi, VP 1992, 'Tax reform: some considerations and limits (lessons from experiences of developing countries)', in K Theodore (ed.), *Tax reform in the Caribbean*, University of the West Indies, Mona, Jamaica, pp. 6-21.
- International Monetary Fund. (2014). *Fiscal Policy and Income Inequality*. IMF Policy Paper, 67.
- Lambert, Peter J. (1993). *Inequality Reduction Through the Income Tax*. *Economica New Series*, 60(239), 357-365
- Martorano, B. (2018). Taxation and Inequality in Developing Countries: Lessons from the Recent Experience of Latin America. *Journal of International Development*, 30(2), 256-273.
- Sharpe, A 2003, 'Linkages between economic growth and inequality: introduction and



- overview', Canadian Public Policy, vol. 29, pp. 1-14.
- Taghizadeh-Hesary, F., Yoshino, N., & Shimizu, S. (2019). The impact of monetary and tax policy on income inequality in Japan. *World Economy*, (837).
- Tamosiune, VI. (2014). Redistributive role of value added tax in Lithuania. *Journal of Business and Economics*. vol. 4, no.1. 25.
- Tanzi, V & Zee, HH. (2000). Tax policy for emerging markets: developing countries. *National Tax Journal*. 53(2). 299-322.
- Martinez-Vazquez, J., Moreno-Dodson, B., & Vulovic, V. (2012). The Impact of Tax and Expenditure Policies on Income Distribution: Evidence from a large panel of countries. Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series, (12-30).
- World Bank 2014, 'World Development Indicators', dilihat 1 September 2014, <<http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators>>.